

## **BAB II**

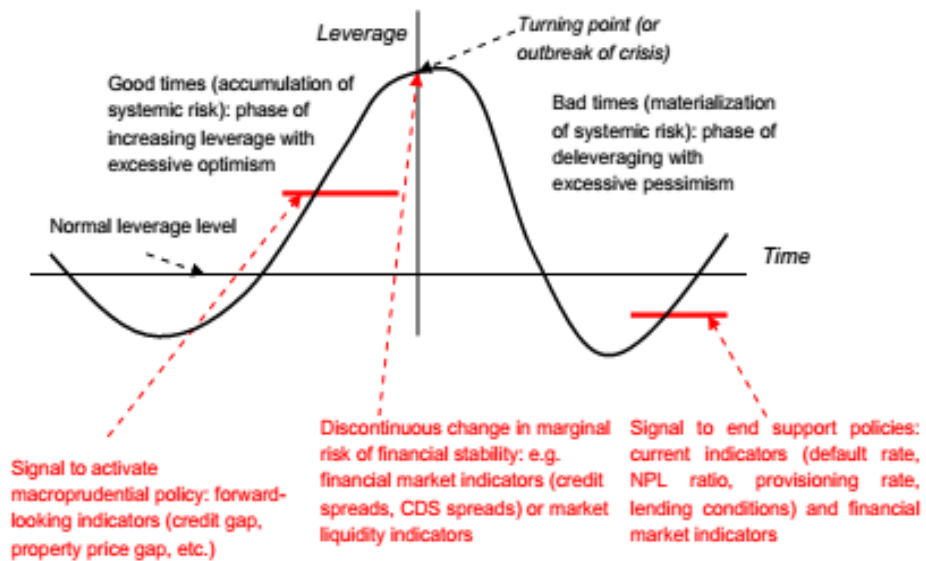
### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pertumbuhan Kredit terhadap Stabilitas Sistem keuangan dan Stabilitas Makro**

Posisi periode terjadinya pertumbuhan kredit yang tinggi sehingga dapat memicu terjadinya dilema pengambil kebijakan disebut *credit boom*. Definisi dari *credit boom* adalah suatu periode disaat pertumbuhan kredit pada sektor swasta melebihi pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada saat siklus bisnis dalam kondisi normal (Mendoza dan Terrines, 2008). Secara umum, pertumbuhan kredit yang makin tinggi akan meningkatkan akses dana pada sektor keuangan dan tentunya akan menunjang pertumbuhan investasi dan perekonomian. Namun menurut Reinhart dan Rogrof (2009) kondisi pertumbuhan kredit yang tinggi dapat memicu kerentanan sektor keuangan dengan melalui penurunan standar pemberian pinjaman, kondisi *leverage* yang berlebih, dan inflasi harga aset.

Faktor yang memicu cepatnya pertumbuhan kredit perbankan adalah bagian dari fase normal suatu siklus bisnis, liberalisasi pada sektor keuangan, dan tingginya aliran modal yang masuk (Dell’Ariccia et al., 2012). Sementara itu, kondisi makroekonomi memiliki pengaruh yang kuat terhadap perkembangan sektor perbankan. Festic dan Beko (2008) mengatakan bahwa eksposur yang berasal dari risiko makroekonomi merupakan sumber risiko sistemik yang dapat mempengaruhi kinerja perbankan melalui rasio kredit bermasalah terhadap total kredit yang secara langsung akan mempengaruhi pertumbuhan kredit.

**Gambar 2.1: Siklus Keuangan dan Evolusi Risiko Sistemik**



Sumber: Frait et al (2011)

Pada gambar 2.1 yang digambarkan oleh Frait et al (2011) menjelaskan bahwa pada saat fase ekspansi terjadi peningkatan pada agregat demand yang turut meningkatkan pertumbuhan kredit perbankan dan *leverage* perekonomian. Hal tersebut secara umum akan dibarengi dengan meningkatnya harga aset, profitabilitas perusahaan, dan ekspektasi konsumen. Harga aset yang mengalami peningkatan tersebut akan turut meningkatkan penilaian terhadap agunan sehingga pinjaman kredit lebih mudah diberikan dan mendorong bank serta nasabah untuk lebih berani mengambil risiko. Menurut Nkusu (2011) mengungkapkan bahwa dengan meningkatnya permintaan agregat yang melebihi kapasitas perekonomian menjadi alasan kerentanan terhadap risiko makroekonomi yang disebabkan oleh peningkatan *leverage* perusahaan dan rumah tangga.

Sementara itu, dari sisi mikro pada stock hutang yang lebih tinggi akan membuat debitur menyikapi terhadap keadaan risiko suku bunga. Ketika *eksposur* tersebut tidak dibatasi maka kerentanan debitur atas risiko diatas akan menyebabkan risiko kredit. Dari hal tersebut terjadinya peningkatan utang yang diakibatkan oleh peningkatan suku bunga dapat menimbulkan permasalahan serius terhadap kondisi portofolio kredit bank dan kegiatan perekonomian riil. Kemudian ketika puncak dari siklus *boom* berakhir akan menyebabkan profitabilitas perusahaan menurun sehingga akan berakibat pada kondisi kelayakan kredit pun turut menurun. Dalam kondisi tersebut memicu meningkatkan *Non Performing Loans* (NPL) yang dapat mempengaruhi kesehatan perbankan.

Secara umum, dari kerentanan pada neraca perbankan, sistem keuangan, dan kondisi makroekonomi memiliki kaitan yang sangat erat. Dalam ketidakseimbangan kondisi makro yang dapat tercermin dari perubahan secara mendadak suku bungan dapat mempengaruhi kemampuan kewajiban debitur dan pada saat yang bersamaan akan meningkatkan kondisi kesehatan pada sektor keuangan. semisal pada kondisi *sudden revearsal capital inflow* akan mendorong terjadinya *hard landing* pada perekonomian dan tentunya akan membuat otoritas akan merespon kondisi tersebut dengan meningkatkan suku bunga. Kondisi ini selanjutnya akan menimbulkan tekanan risiko kredit sektor pebankan yang disebabkan oleh peningkatan suku bunga, melambatnya perekonomian, dan penurunan nilai agunan. Pada sisi lain, permasalahan terhadap sektor keuangan akan memicu ketidakstabilan kondirisi makro akibat reaksi pasar (Utari et al., 2012).

### 2.1.1 Teori Melitz dan Pardue

Melitz dan Pardue (1973) memformulasikan model penawaran kredit oleh perbankan adalah sebagai berikut:

$$SK = g(S, ic, ib, BD)$$

Keterangan:

- SK : Jumlah kredit yang ditawarkan oleh bank
- S : Ketentuan tingkat cadangan bank atau ketentuan mengenai cadangan wajib
- ic : Tingkat suku bunga kredit bank
- ib : Biaya oportunitas meminjamkan uang
- BD : Biaya deposito bank (suku bunga deposito)

Berdasarkan persamaan tersebut dapat dijelaskan bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kredit dari sisi penawaran, yaitu pertama adalah tingkat cadangan bank atau cadangan wajib minimum (S). Cadangan wajib minimum yang dimiliki bank merupakan dana yang ditempatkan pada bank sentral dengan ditambah uang yang secara fisik dalam brangkas bank. Tingkat cadangan yang dimiliki bank akan mempengaruhi jumlah kredit yang akan disalurkan oleh bank tersebut, ketika bank meningkatkan besaran cadangannya maka akan turut mengurangi jumlah kredit yang diberikan kepada nasabah yang dapat diartikan bahwa kemampuan bank dalam menyalurkan kredit akan berkurang. Sementara itu, besaran jumlah cadangan wajib minimum telah diatur dan ditetapkan oleh bank sentral dalam presentase tertentu terhadap dana pihak ketiga bank.

Selanjutnya, faktor suku bunga kredit bank (ic), diartikan bahwa semakin tinggi tingkat suku bunga pinjaman yang ditetapkan oleh bank maka semakin besar pula kredit yang akan disalurkan dan semakin meningkat pula pendapatan yang akan didapat bank dari suku bunga kredit.

Faktor berikutnya adalah biaya oportunitas meminjamkan uang (ib), prioritas perolehan dana bank yang dapat menjadi keuntungan terbesar memang dari perolehan kredit namun kredit memiliki risiko yang cukup besar. Sementara itu, perbankan tidak hanya dapat memperoleh pendapatan yang berasal dari kredit tetapi dapat pula melalui pengalokasian dana untuk investasi, penyertaan dan surat berharga yang dikeluarkan oleh pemerintah sehingga hal tersebut yang dapat menjadi pertimbangan *opportunity cost* dari kredit, seperti halnya dalam penempatannya pada Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang cenderung memiliki tingkat risiko lebih rendah. Maka dari itu, jika tingkat bunga yang dimiliki SBI lebih tinggi dan NPL kredit pun tinggi maka bank akan lebih memilih untuk menempatkan dananya pada surat berharga daripada kredit.

Faktor yang terakhir adalah biaya deposito (BD) yang merupakan hal yang dapat menentukan jumlah kredit yang ditawarkan bank. Biaya deposito adalah biaya dalam bentuk bunga deposito yang diberikan bank kepada para deposan sebagai imbal jasa atas dana yang disimpannya. Ketika biaya deposito bank tinggi maka dana deposito akan meningkat sehingga akan mempengaruhi jumlah kredit yang ditawarkan oleh bank.

### 2.1.2 Teori Stiglitz dan Weiss

Stiglitz dan Weiss (1981) mengatakan bahwa asumsi dasar yang harus dipahami untuk mengukur besaran kredit yang disalurkan adalah adanya risiko kredit. Risiko kredit timbul dikarenakan bank menetapkan tingkat bunga atas pinjaman yang diberikan kepada debitur sebagai *profit* untuk bank. Ketika bank mengharapkan keuntungan maka hal ini bergantung pada besaran tingkat bunga kredit dan kemampuan pada nasabah untuk kewajiban membayar kembali pinjaman. Dalam kenaikan tingkat bunga kredit memiliki dua efek, di suatu sisi dapat meningkatkan *profit*, namun pada sisi lain dapat meningkatkan risiko kredit untuk bank. Selain itu, tingkat bunga kredit yang tinggi dapat menyebabkan jumlah permintaan kredit akan menurun yang dapat diartikan bahwa kenaikan tingkat bunga kredit bank tidak selalu dapat meningkatkan keuntungan bank pula. Oleh sebab itu, hal tersebut dapat tergantung pada dua faktor, pertama efek langsung dari kenaikan tingkat bunga terhadap jumlah debitur (tingkat permintaan kredit), dan kedua, efek secara tidak langsung dari kenaikan tingkat bunga terhadap tingkat risiko kredit (*Non Performing Loan*).

### 2.1.3 Teori Bernake dan Blinder

Bernake dan Blinder (1988) menyatakan bahwa peminjam (permintaan kredit) dan pemberi pinjaman (penawaran kredit) memilih suku bunga sebagai instrumen dalam memilih obligasi dan kredit. Dari hal tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

Rumus permintaan kredit sebagai berikut:

$$L^d = L(\rho, i, y)$$

Sedangkan untuk rumus penawaran kredit adalah:

$$B^b + L^s + E = D(1 - \tau)$$

Berdasarkan kedua rumus tersebut maka kondisi keseimbangan pada pasar kredit adalah:

$$L^d = L(\rho, i, y) = \lambda(\rho, i)D(1 - \tau) \quad \text{dimana: } B^b + L^s + E = \lambda(\rho, i)$$

Keterangan:

$L^s$  : Penawaran kredit

$L^d$  : Permintaan kredit

$\rho$  : Suku bunga kredit

$i$  : Suku bunga obligasi

$y$  : GNP

$B^b$  : Pinjaman

$D$  : Deposito

$\tau$  : Rasio cadangan minimum bank

Dari formulasi tersebut menunjukkan bahwa kredit merupakan substitusi tidak sempurna bagi obligasi karena masyarakat dan perusahaan yang berskala kecil tidak mampu mendapatkan dana dari penerbitan obligasi sehingga mereka sangat bergantung pada penyaluran kredit perbankan. Maka dari itu, penawaran kredit dipengaruhi oleh suku bunga kredit, suku bunga obligasi, jumlah deposito dan rasio cadangan minimum. Pada teori ini dapat dipahami pula bahwa jumlah deposito yang menjadi salah satu dari DPK dapat menjadi faktor penentu penawaran kredit bank karena merupakan sumber dana terbesar yang dimiliki bank. Menjadi hal yang terpenting bagi bank adalah dalam melakukan penghimpunan dana yang maksimal dari masyarakat untuk dapat meningkatkan penawaran kredit. Sementara itu, PDB juga merupakan faktor yang dapat mempengaruhi permintaan kredit, karena PDB menunjukkan pendapatan nasional yang dapat mencerminkan kemampuan membayar kembali dana yang disalurkan

pada debitur. Oleh sebab itu, besaran jumlah PDB akan mempengaruhi permintaan kredit untuk periode selanjutnya (Utari et al, 2012).

## **2.2 Kebijakan Makroprudensial**

Kebijakan makroprudensial untuk pertama kali telah diperkenalkan oleh BCBS (*Basel Committee for Banking Supervision*) pada tahun 2010 yang kemudian didukung oleh pemimpin G20 pada pertemuan *Seoul Summit* 2010. Pada dasarnya, tujuan dari kebijakan makroprudensial untuk menjaga kestabilan sistem keuangan. Namun dalam penerapannya kebijakan ini turut digunakan sebagai hal untuk mencegah terjadinya risiko yang berdampak sistemik, memitigasi dampak dari risiko sistemik, dan memperkuat ketahanan sistem keuangan dari terjadinya krisis. Oleh karena itu, kebijakan makroprudensial dalam orientasi penerapannya bukan hanya untuk menjaga ketahanan dan kesehatan pada individual lembaga keuangan, melainkan lebih secara menyeluruh terhadap sistem keuangan. Selain itu, menurut Clemment (2010) mengungkapkan bahwa kebijakan ini juga dapat dimaksudkan untuk memfokuskan kepada permasalahan "*too big too fail*" terhadap bank yang termasuk dalam kategori *systematically important Financial Institutions* (SIFI) yang dapat menyebabkan risiko sistemik.

Borio (2003) menjelaskan bahwa kebijakan makroprudensial memiliki dua tujuan yaitu tujuan antara dan tujuan akhir. Tujuan antara kebijakan makroprudensial bersifat sebagai pemantauan dan penilaian terhadap kerentanan yang terjadi pada sistem keuangan. Sedangkan, untuk tujuan akhir dari kebijakan makroprudensial ialah untuk menekan kerugian biaya akibat terjadinya krisis yang mengguncang.



Selain itu, menurut Vinals (2011) beragumen bahwa peran dari kebijakan makroprudensial dalam memitigasi risiko sistemik yaitu meredam potensi timbulnya *financial imbalances*, memperkuat ketahanan sistem keuangan terhadap fase *downswing* perekonomian, dan mengidentifikasi serta mengatasi melalui terjadinya kesamaan eksposur, konsentrasi risiko yang terjadi, dan *interconnectedness* antara lembaga keuangan.

Terdapat dua dimensi risiko sistemik yang difokuskan dalam penerapan kebijakan makroprudensial, yaitu dimensi *time series* dan dimensi *cross section*:

1. Dimensi *time series* dapat digambarkan oleh mekanisme keseluruhan risiko yang ada pada sistem keuangan di sepanjang periode. Dengan kata lain, kebijakan ini berfokus untuk mengurangi kecenderungan pada sistem keuangan dalam memperbesar fluktuasi yang ada pada siklus bisnis. Hal tersebut dikarenakan oleh perilaku institusi keuangan terutama pada sektor perbankan yang dilihat berdasarkan penyaluran kredit yang lebih bersifat prosiklikal terhadap siklus bisnis yang kemudian di ikuti dengan kolektifitas institusi keuangan yang cenderung meningkatkan *risk exposure* selama kondisi perekonomian dalam fase *boom* dan seketika berubah menjadi *risk adverse* disaat perekonomian dalam kondisi fase *bust*. Maka dari itu, kebijakan makroprudensial diharapkan dapat memoderasi siklus finansial tersebut.

2. Sedangkan pada dimensi *cross section* lebih menggambarkan distribusi risiko pada sistem keuangan disaat periode tertentu. Dalam hali ini, kebijakan yang digunakan lebih dimaksudkan untuk mengurangi penularan risiko (*spillovers*) yang berasal dari ketidakstabilan keuangan (*financial distress*). Berdasarkan potensi timbulnya permasalahan yang terjadi pada salah satu institusi keuangan dapat memberikan efek tertular dengan cepat kepada institusi keuangan lainnya dikarenakan eratnya sifat ketergantungan yang dimiliki antar individu lembaga keuangan.

Wimananda et al (2012) mengungkapkan pula bahwa kebijakan makroprudensial berfokus kepada interaksi antara intitusi keuangan pasar, infrastruktur dan ekonomi secara luas. Kebijakan makroprudensial pula merupakan komplemen dari beberapa kebijakan salah satunya ialah kebijakan mikroprudensial yang berfokus kepada individu bank. Namun beda halnya dengan protokol manajemen krisis (CMP) kebijakan ini justru sering dapat digunakan pula dalam pencegahan (*preventive*). Secara praktinya, penerapan salah satu instrumen dapat digunakan sebagai objek ganda dengan berkalibrasi dan timing yang tepat, semisal *contigent capital*. Ketika instrumen digunakan untuk seluruh bank dan digunakan untuk sebelum terjadinya risiko sistemik yang berlangsung, maka kebijakan tersebut dapat dikategorikan sebagai kebijakan mikroprudensial. Namun, jika peng-aplikasian instrumen ditujukan pada *systemically important financial institutions* (SIFI) kebijakan tersebut digolongkan sebagai kebijakan makroprudensial. Sementara itu, jika ditujukan untuk merespon dari terjadinya krisis, maka kebijakan tersebut dikategorikan sebagai krisis manajemen.

### 2.3 Instrumen Kebijakan Makroprudensial

Pada dasarnya penggunaan instrumen makroprudensial ditujukan untuk prosiklikalitas dan *common exposure* (Lim et al., 2011). Prosiklikalitas yang merupakan perilaku sistem keuangan yang cenderung mendorong perekonomian tumbuh lebih cepat ketika fase ekspansi dan sebaliknya memperlemah perekonomian ketika fase kontraksi. Sedangkan, *common exposure* digunakan untuk regulasi kehati-hatian pada tiap individu lembaga keuangan.

Penggunaan instrumen makroprudensial cenderung masive banyak diterapkan oleh banyak negara semenjak pasca krisis global tahun 2008. Beberapa negara *emerging market* seperti Indonesia menggunakan instrumen makroprudensial lebih luas dibandingkan negara-negara maju. Dalam penerapan instrumen tersebut tergantung dengan pada tingkat perkembangan dan keuangan, rezim nilai tukar, dan daya tahan kerentanan terhadap jenis guncangan yang sering terjadi (Delgado dan Mynor, 2011).

Secara umum, instrumen atau *tools* yang digunakan untuk kebijakan makroprudensial mengadopsi instrumen mikroprudensial, seperti standar kehati-hatian misalnya, kewajiban dalam memelihara modal yang cukup tinggi dan *buffer* likuiditas) dan instrumen tersebut juga digunakan untuk mengurangi aktivitas yang dapat mendorong peningkatan risiko. Selain itu, instrumen-instrumen kebijakan makroprudensial kerap kali digunakan secara kombinasi dan berkomplemen dengan kebijakan yang bersifat makroekonomi lainnya, seperti kebijakan moneter dan kebijakan fiskal yang dapat berfungsi sebagai *automatic stabilizer*.

Secara umum, instrumen kebijakan makroprudensial dapat digolongkan menjadi tiga bagian yaitu pada tabel 2.1 :

**Tabel 2.1: Instrumen Kebijakan Makroprudensial**

Perihal	Instrumen	Target	%*
Kredit	1. Caps on loan-to-value (LTV) ratio	Prosiklikalitas	41
	2. Caps on the debt-to-income (DTI) ratio	Prosiklikalitas	27
	3. Caps on foreign currency lending	Prosiklikalitas	18
	4. Ceilings on credit or credit growth	Prosiklikalitas	14
Likuiditas	1. Limits on net open currency positions/currency mismatch	Common exposure	39
	2. Limits on maturity mismatch	Common exposure	27
	3. Reserve requirements	Prosiklikalitas	39
Modal	1. Countercyclical/time-varying capital requirements	Prosiklikalitas	22
	2. Time varying/dynamic provisioning	Prosiklikalitas	29
	3. Restrictions on profit distribution	Prosiklikalitas	14

Sumber: *IMF Financial Stability and Macroprudential Policy Survey, 2010\**

Menurut Lima et al (2012) berpendapat bahwa kalibrasi terhadap implementasi instrumen dilakukan secara uji coba tergantung dari jenis guncangan yang dihadapi. Dalam hal ini, desain dan kalibrasi yang dilakukan biasanya lebih berdasarkan pada diskresi (CGFS, 2010). Kelebihan dari diskresi tersebut adalah tingkat fleksibilitas yang cukup tinggi untuk dapat ditujukan dalam penggunaan instrumen sesuai dengan hasil pengalaman dan informasi yang ditanggapi (Beau et al., 2012).

Pada umumnya, pemilihan instrumen kebijakan makroprudensial yang diterapkan oleh beberapa negara berbeda satu sama lain dengan melalui pengamatan tingkat pertumbuhan ekonomi dan kondisi stabilitas sistem keuangan dari negara tersebut. Dominasi sektor perbankan lebih banyak memanfaatkan instrumen makroprudensial dikarenakan dari perkembangan pasar keuangannya sangat merata. Kondisi tersebut menggambarkan pada kebutuhan yang lebih

besar untuk berfokus pada *market failure*. Menurut Utari (2012) di Indonesia kebijakan yang dapat digolongkan untuk mengendalikan kredit diantaranya adalah penetapan rasio Loan To Value (LTV), penetapan rasio Giro Wajib Minimum (GWM), dan pemenuhan rasio kecukupan modal (CAR).

### **2.3.1 Instrumen Makroprudensial Giro Wajib Minimum (GWM) untuk mengendalikan kredit**

Penggunaan instrumen GWM sebagai instrumen kebijakan makroprudensial banyak di terapkan oleh beberapa negara Amerika Latin dan *emerging market*. Dalam hal memenejemen GWM yang cukup aktif dapat difokuskan untuk berbagai tujuan kebijakan makroprudensial antara lain ialah pengendalian siklus kredit, mengurangi risiko sistemik dengan melalui peningkatan struktur pendanaan bank, dan instrumen dapat ditujukan untuk pengalokasian kredit sebagai tujuan mengurangi tekanan likuiditas.

Sebagai cakupan pengendalian kredit, dampak dari GWM terhadap kondisi harga dan ketersediaan kredit dapat ditentukan oleh struktur pasar sistem perbankan, perkembangan sektor keuangan, dan desain kebijakan GWM (Tovar et al., 2012). Proses intermediasi bank yakni dengan menarik simpanan berupa deposito yang kemudian akan disalurkan dalam bentuk kredit, sehingga dalam hal ini bank memiliki nasabah yang telah tercatat pada sisi neraca bank. Oleh sebab itu, perubahan dari GWM bergantung terhadap struktur pada pasar sistem perbankan. Dasar dari perubahan pada GWM akan ditransmisikan berdasarkan ketentuan pada suku bunga pinjaman kredit dan akan berdampak pada penawaran kredit.

Giro Wajib Minimum (GWM) adalah simpanan minimum yang harus dipelihara oleh bank dalam bentuk Rekening Giro pada Bank Indonesia yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK.

Kebijakan pemberian jasa giro atau persentase jasa giro dapat disesuaikan dari waktu ke waktu dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian dan arah kebijakan Bank Indonesia. Penentuan besarnya persentase jasa giro tersebut dilakukan dengan Surat Edar Bank Indonesia. Besarnya GWM sangat tergantung kepada persentase (Rasio GWM) yang ditetapkan oleh bank sentral. Semakin besar rasio GWM yang ditetapkan oleh bank sentral, maka semakin kecil daya ekspansi kredit bank umum. Pada dasarnya perhitungan GWM adalah sebagai berikut:

$$GWM = \frac{\text{Jumlah Saldo Giro di BI}}{\text{Jumlah DPK}} \times 100\%$$

Regulasi yang mendasari dalam aturan GWM adalah Peraturan Bank Indonesia yang ditetapkan oleh Bank Indonesia selaku Bank sentral dan otoritas makroprudensial. Beberapa PBI yang telah dikeluarkan oleh Bank Indonesia mengalami perubahan dan penyesuaian diantaranya PBI No. 12/19/PBI/2010 pada tahun 2010, perubahan kemudian PBI No. 15/7/PBI/2013 pada 26 September 2013, dan SE BI No. 15/41/DKMP pada 1 Oktober 2013.

Menurut PBI No. 12/19/PBI/2010 tentang Giro Wajib Minimum bank umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing menyatakan bahwa bank wajib untuk memenuhi GWM dalam bentuk Rupiah dan Valuta Asing. Penentuan GWM dalam rupiah bank umum harus memenuhi:

1. GWM Primer dalam rupiah sebesar 8% dari DPK dalam rupiah
2. GWM Sekunder dalam rupiah sebesar 2,5% dari DPK dalam rupiah
3. GWM *Loan Deposit Ratio* (LDR) sebesar dari perhitungan antara disinsentif bawah atau parameter atas disinsentif dengan selisih antara LDR bank dan LDR target dengan memperhatikan selisih antara

Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) bank dan KPMM insentif.

Besaran dan parameter yang digunakan dalam perhitungan GWM+LDR dalam rupiah ditetapkan (dapat sewaktu-waktu diubah oleh BI) sebagai berikut :

1. Batas bawah LDR target sebesar 78% dan batas atas LDR target sebesar 100%.
2. Bank yang memiliki LDR di dalam kisaran LDR target memiliki GWM LDR sebesar 0%.
3. Bank yang memiliki LDR kurang dari batas bawah LDR target diberikan disinsentif GWMLDR sebesar perkalian Parameter Disinsentif Bawah (sebesar 0,1) dengan selisih LDR bank dari batas bawah LDR target.
4. Bank yang memiliki LDR lebih dari batas atas LDR target dan memiliki KPMM lebih kecil dari KPMM Insentif (saat ini 14%) akan diberikan disinsentif GWM LDR sebesar perkalian parameter disinsentif atas (saat ini sebesar 0,2) dengan selisih LDR bank dari batas atas LDR target.
5. Bank yang memiliki LDR lebih dari batas atas LDR target dan memiliki KPMM sama atau lebih besar dari KPMM insentif (saat ini sebesar 14%), maka kewajiban pemenuhan GWM LDR sebesar 0%.
6. Besaran dan parameter LDR target, KPMM Insentif, parameter disinsentif bawah, dan parameter disinsentif atas akan dievaluasi sewaktu waktu apabila diperlukan.

Sementara itu, perubahan PBI No. 12/19PBI/2010 pada 4 Oktober 2010 dirubah dengan PBI No. 15/7/PBI/2013 pada 26 September 2013 dan SE BI No. 15/14/DKMP pada 1 Oktober 2013. Ketetapan PBI tersebut bertujuan untuk meningkatkan ketahanan sektor perbankan dalam menghadapi risiko khususnya terkait dengan risiko kredit dan likuiditas. Sehingga dapat mendukung stabilitas sistem keuangan sekaligus stabilitas moneter melalui penguatan intermediasi bank. Adapun melalui pokok ketentuan dari PBI tersebut adalah bank wajib memelihara tambahan GWM rupiah (selain GWM primer dan GWM sekunder yang besarnya ditentukan berdasarkan presentase tertentu dari total DPK rupiah bank) yang nilainya ditentukan berdasarkan angka LDR bank. Penyesuaian perubahan terhadap batas atas GWM+LDR yang diturunkan dari 100% menjadi 92% sedangkan batas bawah tetap pada 78%.

Oleh sebab itu, bank diharapkan dapat menjaga kondisi LDR mereka pada kisaran 78% sampai dengan 92% disinsentif batas atas dikenakan kepada bank yang memiliki LDR diatas 92% dengan KPMM (Kewajiban Penyediaan Modal Minimum) atau CAR kurang dari 14%, sementara disinsentif batas bawah dikenakan kepada bank-bank dengan LDR kurang dari 78%.

Ketentuan Giro Wajib Minimum diperlukan untuk mempengaruhi likuiditas dalam perbankan. Bank dalam menghimpun dana diwajibkan memelihara sejumlah likuiditas tertentu dari total DPK yang dihimpun bank pada periode tertentu. Besaran jumlah likuiditas wajib minimum tersebut harus ditetapkan dalam rekening giro bank yang bersangkutan pada bank sentral. Dalam hal ini, perhitungan GWM untuk analisis eksternal menggunakan data laporan keuangan bank yang dipublikasikan oleh tiap bank. Sementara itu, ketentuan dari Bank Indonesia yang mewajibkan bank umum untuk mempublikasikan laporan keuangan tiap triwulan.



Secara umum, ditetapkan GWM+LDR target dapat menjadi tujuan untuk secara makro sebagai pencerminan kebutuhan kredit yang diperlukan untuk salah satu penopang target pertumbuhan ekonomi, sementara itu secara mikro penetapan LDR target dapat memberikan pertimbangan terhadap kondisi likuiditas dan LDR bagi perbankan agar selalu menjalankan usaha yang optimal dan dapat memrepresentasikan kondisi kinerja keuangan yang sehat. Selain itu, pembatasan GWM+LDR target bukan menjadi hal yang sulit bagi perbankan dalam menyalurkan kredit di atas batas atas target GWM+LDR selama dapat ditopang dengan ketahanan modal yang sesuai.

### **2.3.2 Instrumen Makroprudensial *Capital Buffer* untuk mengendalikan kredit**

Instrumen yang berkaitan dengan modal ialah *countercyclical capital requirements* dan *dynamic provisioning* yang difokuskan sebagai *buffer* dalam siklus keuangan. Beberapa elemen dari aturan permodalan dan likuiditas pada Basel III yang dapat berfungsi untuk memitigasi risiko sistemik. Tingkat dan kualitas modal yang lebih tinggi dapat meningkatkan *self-insurance* dan menjadikan *buffer* untuk risiko yang disebabkan siklus kredit dan harga aset. Nilai modal dapat naik atau turun sesuai dengan kondisi pertumbuhan kredit dimana modal akan naik apabila pertumbuhan kredit berada pada diatas rata-rata atau *threshold*-nya, begitu pula sebaliknya. Penerapan besarnya *buffer* dilakukan secara diskresi yang besarnya antara 0-2.5%.

Penerapan *dynamic provisioning* sama dengan *countercyclical capital buffer* di atas yaitu, penambahan cadangan sebagai *buffer* yang diperlukan apabila bank memberikan tambahan kredit. *Bank of Spain* adalah *pioneer* dalam penerapan instrumen ini. Pembatasan penyaluran kredit (*caps on bank leverage*) merupakan salah satu instrumen untuk menghambat pertumbuhan aset dengan melihat rasio

total aset terhadap modal bank. Dengan demikian, peran modal bank ialah sebagai *constraint* pada kredit baru.

Dari hasil studi terdahulu ada terdapat beberapa argumen mengapa perbankan pada umumnya memiliki *capital buffer*. Menurut Tabak et al (2011) menyatakan bahwa bank memiliki *buffer* permodalan bertujuan untuk mengikuti disiplin pasar, pemenuhan ketentuan pengawasan, dan mengantisipasi terhadap terjadinya *shock* pada perekonomian.

Bank dalam memelihara *buffer capital* dapat ditujukan untuk menghindari biaya yang terkait dengan disiplin pasar (Lindquist, 2004 dalam Tabak et al., 2011). Hal tersebut disebabkan, ketika tidak semua liabilitas bank dijamin, maka deposan akan meminta imbal hasil yang cenderung lebih tinggi (dalam bentuk suku bunga simpanan) sebagai kompensasi atas risiko yang lebih tinggi. Oleh sebab itu, bank akan berusaha mengurangi risiko dan biaya simpanan dengan meningkatkan level permodalan yang menunjukkan tingkat *soudness* perbankan.

Selain itu, menurut Nier dan Baumann (2006) motif bank dalam menjaga *capital buffer* untuk mengurangi risiko *insolvency*. Dalam hal tersebut dapat dicapai dengan meningkatkan level permodalan dari batas ketentuan modal minimum. Sementara itu, bank juga menjaga *buffer* modalnya untuk memberikan sinyal kepada pasar agar lebih bersaing dalam hal mendapatkan pendanaan yang lebih efisien.

Sementara itu, selain beberapa pendapat diatas bank dalam menjaga level *buffer* modal yang diwajibkan untuk penerapan teknis seperti ditujukan dalam pengaman agar menghindari pelanggaran ketentuan modal minimum (Jokipii dan Milne, 2006). Namun menurut Tabak et al (2011) menyatakan bahwa ketika terjadinya perubahan dalam modal minimum, bank seketika tidak dapat secara

langsung melakukan penyesuaian level modal. Hal ini disebabkan adanya penyesuaian biaya terkait dengan peningkatan modal baru yang berasal dari eksternal (*fresh external capital*).

Dalam hal ini, perubahan pada permodalan bank dapat mempengaruhi kredit dengan melalui dua transmisi, yaitu *lending channel* dan *capital channel*. Dari kedua transmisi tersebut didasarkan atas permasalahan *adverse selection* yang mempengaruhi penghimpunan dana oleh bank. Pada transmisi *Lending channel* tergantung pada ketidaksempurnaan pasar pada pinjaman perbankan, sementara pada *capital channel* tergantung pada ketidaksempurnaan pasar pada ekuitas perbankan (Gambacorta dan Mistrulli, 2003).

Bank *lending channel* dapat dijelaskan ketika terjadi pengaruh pengetatan kebijakan moneter yang dapat meningkatkan *cost of fund* bank pada khususnya DPK dan mengurangi *interest margin* sebagai akibatnya profitabilitas bank akan menurun. Dalam kondisi tersebut bank harus meningkatkan permodalan, maka tentunya bank akan bereaksi dengan meningkatkan biaya persyaratan kredit, sehingga pada akhirnya hal tersebut mengurangi penyaluran kredit dikarenakan adanya peningkatan biaya. Namun, bagi bank memiliki permodalan yang kuat dan memiliki akses dana yang lebih luas (tidak hanya DPK), kondisi tersebut tidak terlalu bermasalah (Gambacorta dan Mistrulli, 2003).

Sedangkan pada *buffer* modal bank akan berkurang ketika terjadinya peningkatan ketentuan modal minimum. Dalam hal ini, regulasi permodalan bank dapat mempengaruhi penyaluran kredit melalui transmisi *capital channel* dengan dua kondisi yang jika terpenuhi. Pada kondisi pertama, bank memilih untuk memenuhi ketentuan permodalan karena menyadari pelanggaran terhadap ketentuan modal minimum sangat berisiko (Van den Heuvel, 2002 dikutip dari Gambarcota dan Ibanes, 2011).

Hal tersebut dikarenakan bank yang tidak memiliki *buffer* modal tinggi dan tidak memiliki akses luas terhadap sumber permodalan yang lain akan melakukan penyesuaian pada jumlah kredit yang disalurkan. Namun justru sebaliknya, bagi bank yang memiliki *buffer* modal yang lebih atau memiliki akses dana lebih terhadap sumber modal dapat menyesuaikan besaran modal yang harus dipenuhi tanpa mempengaruhi portofolio kreditnya. Sementara itu, pada kondisi kedua ialah jika pasar untuk ekuitas bank tidak sempurna karena bank tidak dapat dengan mudah mengeluarkan ekuitas baru, terutama pada periode saat krisis dikarenakan adanya *tax disadvantage* serta masalah *adverse selection* dan *agency cost* (Gambacorta dan Mistrulli, 2003).

## **2.4 Hubungan Antar Variabel**

### **2.4.1 Hubungan Instrumen Makroprudensial GWM+LDR dan Pertumbuhan kredit**

Menurut Melitz dan Pardue (1973) tingkat cadangan yang dimiliki bank akan mempengaruhi jumlah kredit yang akan disalurkan oleh bank tersebut, ketika bank meningkatkan besaran cadangannya maka akan turut mengurangi jumlah kredit yang diberikan kepada nasabah yang dapat diartikan bahwa kemampuan bank dalam menyalurkan kredit akan berkurang. Sementara itu, besaran jumlah cadangan wajib minimum telah diatur dan ditetapkan oleh bank sentral dalam presentase tertentu terhadap dana pihak ketiga bank.

Melalui penerapan ketentuan instrumen makroprudensial GWM+LDR dapat mendorong fungsi intermediasi secara optimal dalam hal ini berupa kredit. Instrumen GWM+LDR diharapkan dapat menyesuaikan pertumbuhan kredit dan mengendalikan risiko yang muncul akibat perilaku sektor perbankan ketika terjadinya prosiklikalitas dalam penyaluran kredit. dalam peningkatan fungsi intermediasi perbankan akan mendorong ekspansi neraca bank dan akan turut

meningkatkan akses pembiayaan pada sektor riil dalam hubungannya sebagai penggerak perekonomian. Menurut Wimananda et al (2012) mengatakan implementasi dari kebijakan makroprudensial bersifat kontraktif dengan pertumbuhan kredit bank yang akan mengalami penurunan, hal tersebut dikarenakan oleh sinkronisasi antara kebijakan pengetatan GWM dengan kenaikan suku bunga kebijakan BI rate. Berdasarkan penjelasan di atas maka bisa ditarik hipotesis bahwa GWM+LDR berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan kredit.

#### **2.4.2 Hubungan *Capital Buffer* dan Pertumbuhan Kredit**

*Capital buffer* merupakan sebagai ketentuan penyangga modal dalam memenuhi persyaratan modal minimum yang digunakan untuk memitigasi terjadinya risiko sistemik yang disebabkan oleh pertumbuhan kredit yang berlebihan. Berdasarkan hal tersebut, tingkat perubahan permodalan melalui transmisi lending channel dan capital channel dalam mempengaruhi kredit.

Pada transmisi lending channel bank, ketika terjadinya pengetatan regulasi kebijakan moneter yang dapat menyebabkan tingkat cost of fund bank khususnya pada DPK, serta akan mengurangi interest margin yang akan berakibat pada tingkat profitabilitas bank akan turut menurun. Dalam kondisi tersebut, bank akan meningkatkan permodalan dan bank akan bereaksi dengan meningkatkan persyaratan kredit serta hal itu akan mengurangi penyaluran kredit sehingga berdampak pada peningkatan biaya bagi nasabah.

Sementara itu, capital buffer bank akan berkurang ketika terjadi peningkatan ketentuan modal minimum melalui transmisi capital channel dalam mempengaruhi penyaluran kredit. Pihak perbankan akan memilih untuk memenuhi ketentuan permodalan didasari dengan menghindari adanya pelanggaran terhadap ketentuan modal minimum, bagi bank yang tidak memiliki akses luas

dalam sumber permodalan lainnya akan melakukan penyesuaian pada jumlah kredit yang disalurkan. Namun sebaliknya, bagi bank yang memiliki buffer modal lebih ataupun mempunyai akses modal yang luas dapat menyesuaikan besaran modal yang harus dipenuhi tanpa turut mempengaruhi porposisi penyaluran kreditnya. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Pramono et al (2015) menghasilkan bahwa permodalan bank terbukti memiliki hubungan negatif terhadap pertumbuhan kredit meskipun dengan magnitude yang tidak terlalu besar. Berdasarkan pembahasan dan penelitian yang telah ada dapat dibuat hipotesis bahwa Capital buffer berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan kredit bank.

## 2.5 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penggunaan instrumen kebijakan makroprudensial yang diterapkan ditampilkan dalam tabel 2.2 sebagai berikut:

**Tabel 2.2: Penelitian terdahulu**

No.	Nama dan Judul	Variabel	Metode	Hasil
1.	Lim et al, (2011). <i>Macroprudential Policy: What Instruments and How to Use Them? Lessons from Country Experiences</i>	Instrumen LTV ( <i>Loan to Value</i> ), DTI ( <i>Debt to Income</i> ), Buffer, GWM LDR, <i>Dinamic Provisioning</i> , dan Variabel Makro : GDP dan Suku Bunga	Regresi Panel.	Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa instrumen makroprudensial yang diterapkan pada 49 negara berpengaruh secara signifikan dan negatif dalam mengurangi prosiklikalitas kredit dan efektifitas dari kebijakan makroprudensial bergantung pada tipe guncangan pada sektor keuangan pada negara tersebut.
2.	Tovar et al, (2012). <i>Credit Growth and the Effectiveness of Reserve Requirements and Other Macroprudential Instruments in Latin America</i>	Instrumen kebijakan makroprudensial <i>reserve requirement</i> atau GWM dan pertumbuhan kredit	Panel Vector Auto Regresion (VAR).	Hasil dari penelitian tersebut adalah penerapan <i>reserve requirements</i> pada negara Amerika Latin memiliki efek yang tidak terlalu tinggi dan bersifat jangka pendek dalam mempengaruhi pertumbuhan kredit. Mereka juga menyimpulkan bahwa <i>reserve requirements</i> berlaku sebagai komplementer untuk melengkapi kebijakan moneter.

No.	Nama dan Judul	Variabel	Metode	Hasil
3.	Utari et al, (2012). Pertumbuhan Kredit Optimal dan Kebijakan Makroprudensial Untuk Pengendalian Kredit.	Variabel dependen: Pertumbuhan kredit. Variabel independen: Pertumbuhan GDP riil, Inflasi, suku bunga kredit., rasio NPL, GWM, dan <i>Capital Buffer</i> .	Markov Switching-Vector Auto Regresion/Vector Error Correction (MS-VAR/VECM) dan regresi data panel.	Hasil dari penelitian ini adalah pada analisis MS-VAR pertumbuhan kredit dalam rezim normal sama dengan analisis yang dilakukan dengan MS-VECM. Sementara itu, instrumen makroprudensial GWM berdampak signifikan terhadap pertumbuhan kredit sedangkan instrumen <i>Capital Buffer</i> berpengaruh secara tidak signifikan dan negatif terhadap pertumbuhan kredit.
4.	Tabak et al, (2011). <i>Bank Capital Buffers, Lending Growth, and Economic Cycle: Empirical Evidence for Brazil</i> .	Instrumen <i>Capital Buffer</i> dan pertumbuhan kredit. Variabel makroekonomi : Output gap, Suku Bunga negara Brazil (SELIC). Variabel mikroperbankan: ROE, NPL, dan Size perbankan.	Regresi data panel dinamis FGLS ( <i>Feasible Generalized Least Square</i> ).	Pada tahap penelitian adalah mengestimasi pengaruh output gap dan beberapa variabel kontrol terhadap <i>capital buffer</i> untuk mengetahui apakah <i>buffer</i> modal bersifat <i>procyclical</i> atau <i>countercyclical</i> . Selanjutnya dilakukan estimasi pengaruh perilaku <i>capital buffer</i> terhadap pertumbuhan kredit. Hasil studi menemukan bahwa <i>capital buffer</i> bersifat <i>countercyclical</i> dan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan kredit secara signifikan.
5.	Wimananda et al, (2012). Studi Penerapan Kebijakan Makroprudensial di Indonesia: Evaluasi dan Analisa Integritas Kebijakan Bank Indonesia.	Variabel instrumen makroprudensial yang digunakan: Variabel Volatilitas Nilai Tukar : <i>One Month Holding (OMH)</i> <i>Six Month Holding (SMH)</i> dan <i>Net Open Position (NOP)</i> . Variabel Kredit : LTV dan GWMLDR.	<i>Event Analysis</i> & Uji Ekonometrik Vector Autoregresion Exogenous (VARX).	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kebijakan makroprudensial yang ditempuh oleh Bank Indonesia sebagian besar efektif, baik melalui <i>event analysis</i> maupun uji ekonometrik (VARX) - Tingkat volatilitas nilai tukar menurun setelah penerapan kebijakan OMH, SMH maupun NOP - Selain itu, penerapan LTV dan GWMLDR juga efektif dalam menurunkan laju pertumbuhan kredit di sektor properti dan kendaraan bermotor.



No.	Nama dan Judul	Variabel	Metode	Hasil
6.	Nasir (2015). The Role Of Macroprudential Policy To Manage Exchange Rate Volatility, Excess Baking Liquidity and Credits.	Variabel instrumen makroprudensial yang digunakan: Variabel Volatilitas Nilai Tukar : <i>Month Holding Period</i> (MHP) dan Posisi Devisa Neto (PDN). Variabel kredit: GWM dan GWMLDR	<i>Event Analysis &amp; Uji Ekonometrik Vector Autoregresion Exogenous (VARX).</i>	Dalam hasil penelitian ini menyatakan bahwa <i>Event Analysis</i> dan metode ekonometrik VARX yang dilakukan pada instrumen kebijakan makroprudensial : <i>Month Holding Period</i> (MHP) dan Posisi Devisa Neto (PDN) menunjukan hasil yang efektif dalam mengatasi tingkat volatilitas nilai tukar. Sementara itu, instrumen kebijakan makroprudensial GWM sangat terbatas dalam mengatasi likuiditas perekonomian sedangkan GWMLDR menunjukan hasil yang efektif dalam mengatasi kredit bank.
7.	Pramono et al, (2015). Dampak Kebijakan <i>Countercyclical Capital Buffer</i> Terhadap Pertumbuhan Kredit di Indonesia	Instrumen <i>Capital Buffer</i> , pertumbuhan kredit, variabel makro eknomi (GDP dan BI rate) variabel mikro perbankan (total aset, ROA, dan CAR).	Data panel dinamis system GMM ( <i>Generalization Method of Moments</i> ).	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan regulasi permodalan, seperti CCB mempunyai hubungan negatif dan signifikan dalam mempengaruhi pertumbuhan kredit.
8	Ayu Swaningrum dan Peggy Hariwan (2014), Evaluasi Efektifitas Instrumen Makroprudensial Dalam Mengurangi Risiko Sistemik.	Pertumbuhan Kredit. Instrumen Makroprudensial: GWM+LDR dan LTV. Pertumbuhan PDB, Tingkat Suku Bunga.	Regresi Data Panel	Hasil penelitian menunjukan bahwa Instrumen kebijakan makroprudensial LTV dan berpengaruh negatif dan tidak signifikan dalam mengatasi prosiklikalitas kredit dan instrumen GWM+LDR berpengaruh secara positif dan tidak signifikan dalam mengatasi prosiklikalitas kredit.

Sumber: Berbagai penelitian.

Dari tabel 2.2 diatas mengenai penelitian terdahulu, secara ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Lim et al (2011) dalam penelitiannya yang berjudul “*Macroprudential Policy: What Instruments and How to Use Them? Lessons from Country Experiences*” dengan menggunakan metode regresi panel pada 49 negara dan variabel yang digunakan dalam penelitiannya adalah instrumen makroprudensial LTV (*Loan to Value*), DTI (*Debt to Income*), *Buffer*, GWM LDR, *Dinamic Provisioning*, menyimpulkan bahwa sebagian besar instrumen kebijakan berpengaruh signifikan dan negatif terhadap prosiklikalitas kredit dan efektifitas pada kebijakan makroprudensial tergantung pada jenis guncangan yang terjadi pada sektor keuangan negara tersebut.

Tovar et al (2012) dalam penelitiannya yang berjudul “*Credit Growth and the Effectiveness of Reserve Requirements and Other Macroprudential Instruments in Latin America*” di Amerika Latin yang meliputi 5 negara yaitu, Brazil, Chili, Kolombia, Meksiko, dan Peru. Dalam penelitiannya mereka menggunakan variabel Giro Wajib Minimum atau *reserve requirements* sebagai instrumen makroprudensial terhadap pertumbuhan kredit dengan menggunakan metode analisis VAR (*Vector Autoregresion*) dengan data panel pada periode 2003-2011. Hasil dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa penerapan *reserve requirements* sebagai kebijakan yang bersifat *countercyclical* memiliki efek yang tidak terlalu tinggi dan bersifat jangka pendek dalam mempengaruhi pertumbuhan kredit. Selain itu, mereka juga menyatakan bahwa *reserve requirements* berlaku sebagai komplementer untuk melengkapi kebijakan moneter.

Utari et al, (2012) melakukan penelitian dengan variabel instrumen makroprudensial GWM dan *buffer* dalam penelitiannya yang berjudul “Pertumbuhan Kredit Optimal dan Kebijakan Makroprudensial Untuk Pengendalian Kredit” dengan menggunakan metode Markov Switching-Vector Auto Regression/Vector Error Correction (MS-VAR/VECM) dan regresi data panel mengungkapkan bahwa instrumen makroprudensial GWM berdampak signifikan terhadap pertumbuhan kredit sedangkan instrumen *Capital Buffer* berpengaruh secara tidak signifikan dan negatif terhadap pertumbuhan kredit.

Tabak et al (2011) menganalisis hubungan antara *capital buffer* dan siklus ekonomi serta pengaruh regulasi permodal terhadap kredit perbankan dalam penelitiannya yang berjudul “*Bank Capital Buffers, Lending Growth, and Economic Cycle: Empirical Evidence for Brazil*” dengan menggunakan metode analisis regresi data panel dinamis *FGLS (Feasible Generalized Least Square)* pada periode 2000-2010. Dalam penelitian tersebut mereka menemukan bahwa *capital buffer* bersifat *countercyclical* dan berpengaruh signifikan dan negatif terhadap pertumbuhan kredit.

Wimananda et al (2012) melakukan penelitian dengan menggunakan variabel instrumen makroprudensial variabel volatilitas nilai tukar (*One Month Holding (OMH) Six Month Holding (SMH)* dan *Net Open Position (NOP)*) dan Variabel Kredit (LTV dan GWMLDR) dalam penelitian yang berjudul “Studi Penerapan Kebijakan Makroprudensial di Indonesia: Evaluasi dan Analisa Integritas Kebijakan Bank Indonesia” menggunakan metode *Event Analysis & Uji Ekonometrik Vector Autoregresion Exogenous (VARX)* mengemukakan bahwa instrumen dan kebijakan makroprudensial yang ditempuh oleh Bank Indonesia sebagian besar efektif, baik melalui *event analysis* maupun uji ekonometrik (*VARX*) menyimpulkan bahwa tingkat volatilitas nilai tukar menurun setelah

penerapan kebijakan OMH, SMH maupun NOP. Selain itu, penerapan LTV dan GWMLDR juga efektif dalam menurunkan laju pertumbuhan kredit di sektor properti dan kendaraan bermotor.

Sama halnya dengan hasil yang ditunjukkan pada penelitian oleh Nasir (2015) dalam penelitiannya yang berjudul “The Role Of Macroprudential Policy To Manage Exchange Rate Volatility, Excess Banking Liquidity and Credits” dengan metode *Event Analysis & Vector Autoregression Exogenous (VARX)* mengungkapkan bahwa instrumen kebijakan makroprudensial GWM sangat terbatas dalam mengatasi likuiditas perekonomian sedangkan GWMLDR menunjukkan hasil yang efektif dalam mengatasi kredit bank.

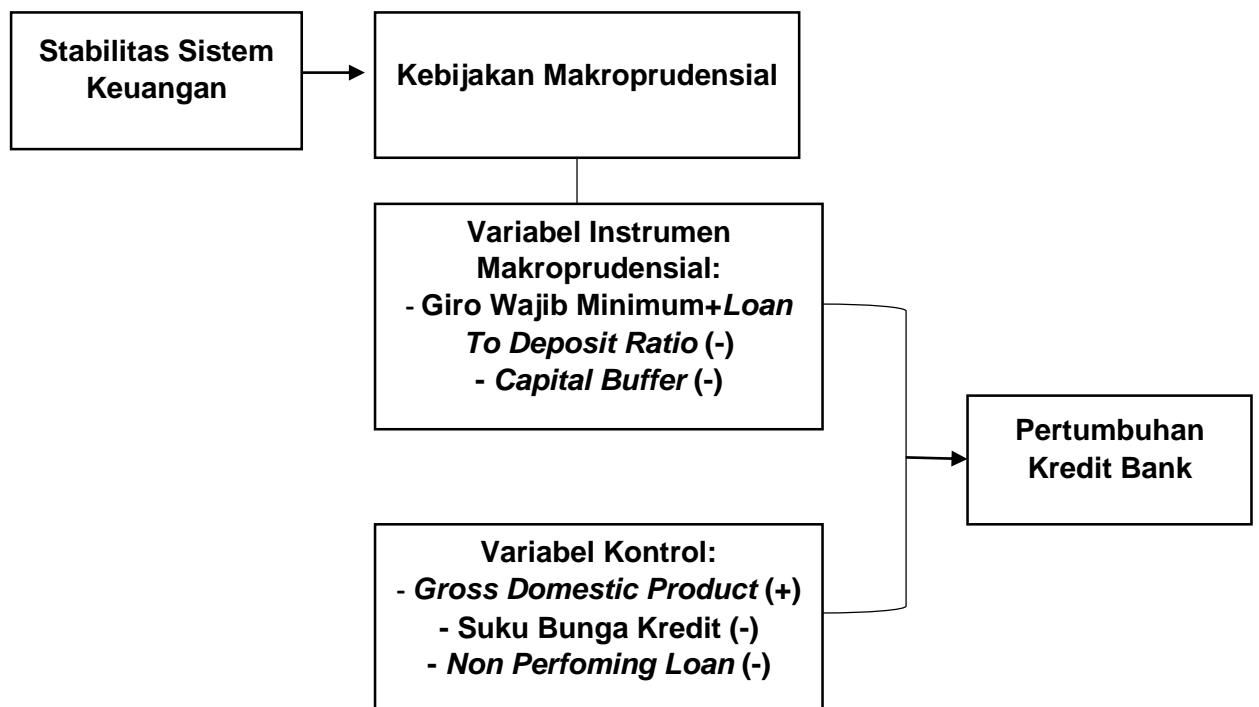
Pramono et al (2015) melakukan penelitian dengan berjudul “Dampak Kebijakan *Countercyclical Capital Buffer* Terhadap Pertumbuhan Kredit di Indonesia” metode penelitian yang digunakan adalah regresi data panel dinamis system GMM (*Generalization Method of Moments*) menyimpulkan bahwa perubahan regulasi permodalan, seperti CCB mempunyai hubungan negatif dan signifikan dalam mempengaruhi pertumbuhan kredit.

Ayu Swaningrum dan Peggy Hariwan (2014), “Evaluasi Efektifitas Instrumen Makroprudensial Dalam Mengurangi Risiko Sistemik”. Variabel dalam penelitian tersebut adalah Pertumbuhan Kredit, Instrumen Makroprudensial: GWM+LDR dan LTV. Pertumbuhan PDB dan Tingkat Suku Bunga. Pada hasil penelitian yang dilakukan bahwa instrumen kebijakan LTV dapat mampu mengatasi terjadi prosiklikalitas kredit namun tidak secara signifikan, sedangkan variabel GWM+LDR belum memberikan tanda dapat menurunkan terjadinya prosiklikalitas kredit pada tahun penelitian tersebut serta tidak secara signifikan.

## 2.6 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran ini bertujuan agar penelitian ini dapat dipahami dan sesuai dengan landasan teori yang telah dijelaskan sebelumnya. Secara garis besar kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat ditunjukkan dalam Gambar 2.2 (Kerangka Pemikiran).

**Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran**



Sumber: Penulis

## 2.7 Hipotesis

Hipotesis merupakan pendapat sementara atau dugaan yang masih harus diuji kembali kebenarannya. Penentuan hipotesis berasal dari teori-teori dan penelitian-penelitian yang telah ada. Menurut Zikmund (1997) mengatakan bahwa hipotesis adalah proposisi atau dugaan yang belum terbukti, secara tentatif menjelaskan fakta atau fenomena, serta kemungkinan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian. Untuk itu perlu diadakan pengujian untuk memberikan pembuktian serta menghilangkan sifat tentatifnya hingga menjadi kesimpulan yang final. Berdasarkan hal tersebut untuk hipotesis pada penelitian ini adalah diduga variabel instrumen Makroprudensial Giro Wajib Minimum+*Loan Deposit to Ratio* dan variabel *Capital Buffer* berpengaruh secara negatif serta variabel kontrol *Gross Domestic Product* berpengaruh positif, Suku Bunga Kredit berpengaruh negatif dan *Non Performing Loan* berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan kredit bank umum konvensional di Indonesia.